

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Januari 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Kabupaten Sumbawa sebesar 0,18 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,83. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,35 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,73 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,41 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,36 persen; kelompok transportasi sebesar 0,14 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 5,10 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,75 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,48 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,03 persen.

Tingkat deflasi *month to month (m-to-m)* sebesar 0,17 persen dan tingkat deflasi *year to date (y-to-d)* sebesar 0,17 persen.

Pada Februari 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Kabupaten Sumbawa sebesar 0,15 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,41. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,88 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,82 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,36 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,09 persen; kelompok transportasi sebesar 0,04 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 4,91 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,75 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,48 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,33 persen.

Tingkat deflasi *month to month (m-to-m)* sebesar 0,39 persen dan tingkat deflasi *year to date (y-to-d)* sebesar 0,56 persen.

Pada Maret 2025 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Kabupaten Sumbawa sebesar 0,68 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,37. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,39 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,91 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,46 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,94 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 4,91 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,75 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,29 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,98 persen.

Tingkat inflasi *month to month (m-to-m)* sebesar 1,84 persen dan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* sebesar 1,27 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambakan yang melibatkan berbagai pihak terkait di Kabupaten Sumbawa. Dalam rapat ini berfokus pada upaya meningkatkan pengelolaan pertambakan yang berkelanjutan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal

sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem pertambakan yang lebih baik dan produktif. Dengan pendekatan yang tepat, kita yakin sektor ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Sumbawa

Rapat koordinasi tersebut, memiliki tiga tujuan utama, yaitu mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi tambak udang di Sumbawa, meningkatkan kualitas pengelolaan tambak melalui penerapan tata kelola yang baik, serta mengidentifikasi permasalahan serta mencari solusi untuk meningkatkan kualitas produksi dan pengelolaan tambak udang, pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan tata kelola tambak udang yang baik. Tambak udang merupakan sektor penting bagi perekonomian daerah, tetapi pengelolaannya harus dilakukan dengan baik agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Monitoring dan evaluasi yang efektif sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan industri ini. Tata kelola tambak udang dapat sustainable atau berkelanjutan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjaga kesehatan ekosistem tambak. Melalui rapat ini, diharapkan dapat terbentuk Tim Koordinasi Tata Kelola Monitoring dan Evaluasi Tambak Udang yang akan bertugas dalam pengawasan dan pembinaan sektor pertambakan. Selain itu, permasalahan dalam budidaya udang dapat diidentifikasi dengan lebih baik sehingga solusi yang tepat dapat diterapkan guna meningkatkan kualitas dan produktivitas udang di Sumbawa

2. Dalam rangka pengadaan beras maka pelayanan pemerintah khususnya Bulog khususnya peralatan pendukung belum menggunakan teknologi yang modern dan meminimalisir penggunaan SDM mengingat keterbatasan pekerjaan oleh SDM. Alat penimbangan yang modern dan layak untuk mengurangi penggunaan SDM yang terbatas. Alat untuk mengecek kadar air yang saat ini masih memerlukan waktu lama yang mengakibatkan waktu menunggu truk lebih lama (1 sampai 2 hari) menginap di gudang Bulog sehingga menyebabkan tambahan biaya bagi pengusaha.
3. Untuk bidang perhubungan belum ada kebijakan pemerintah daerah yang mempengaruhi transportasi/distribusi bahan pangan secara langsung, yang ada hanya pengaturan distribusi dalam kota. Jalur dan rantai distribusi komoditi *volatile food* yang masih didatangkan dari luar daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Untuk yang sumber anggaran dari APBD secara langsung sudah diatasi, contoh daerah yang mengalami kerusakan akibat hujan sudah diperbaiki sehingga tidak ada akses antar kecamatan yang terputus. Untuk daerah2 yang sering terjadi longsor mengacu kepada informasi BMKG untuk langkah antisipasi akan adanya dampak musim hujan.
- Terpeliharanya sedimen yang menampung air sehingga tersedia air yang dibutuhkan untuk irigasi, mengingat saat ini perubahan cuaca terjadi lebih cepat (musim kemarau ke musim hujan beralih lebih cepat).
- Sinergi antara pemerintah pusat pemerintah daerah, BUMN/BUMD terhadap komoditas yang perlu mendapat perhatian lebih dalam stabilisasi harga dan kebijakan pengendalian inflasi.
- Mengintensifkan SIANDINI (Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi) melalui siandini.sumbawakab.go.id
- Melaksanakan pemetaan stok pangan dikabupaten/kota untuk memetakan daerah surplus dan defisit stok pangan sebagai basis data penyediaan pangan sebagai dasar

pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Meningkatkan Pelaksanaan pengendalian inflasi agar tetap pada kisaran target nasional.
- Perlu menjadi perhatian Bulog terkait pelayanan pergudangan, antara lain meliputi : Perbaikan jembatan timbang dan porklip di gudang Bulog, Menggunakan alat yang modern sehingga mengurangi penggunaan SDM yang menyebabkan keterbatasan dalam pelayanan, Alat untk mengecek kadar air menggunakan teknologi yang lebih modern untuk menghemat waktu, Penambahan kapasitas gudang Bulog
- Tata kelola Stok komoditi *volatile food* seperti bawang dan cabai masih belum maksimal karena gudang yang belum tersedia.
- Pemanfaatan tol laut sebagai sarana distribusi bahan kebutuhan yang berasal dari luar pulau.
- Pelaksanaan Kerjasama antar daerah belum terlaksana.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pemetaan stok pangan, distribusi dan konsumsi yang intensif melakukan sinkronisasi data antar instansi dan peningkatan koordinasi antar instansi.
- Optimalisasi Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pangan dengan dukungan digital market.
- Pemanfaatan tol laut bagi distribusi kebutuhan dari luar pulau. Aplikasi teknologi tepat guna
- Penguatan kapasitas petani
- Peningkatan kelembagaan koperasi
- Penguatan skim pembiayaan produksi (hulu)